

RETRIBUSI – KEPARIWISATAAN
PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 13 TAHUN 2005
2005

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

- Abstrak** : - Bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian pelayanan terhadap masyarakat dibidang kepariwisataan sebagai perwujudan dalam jasa pelayanan izin usaha kepariwisataan, maka perlu dibuat suatu peraturan baru yang mengatur mengenai hal tersebut yang ditetapkan dengan Perda;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 tahun 1990; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; ; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 tahun 2001; Perda Kabupaten Daerah Tingkat I Garut No. 1 Tahun 1986; Perda Kabupaten Garut No. 6 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2001; Perda Kabupaten Garut No. 5 Tahun 2002; Perda Kabupaten Garut No. 7 Tahun 2002; Perda Kabupaten Garut No. 7 Tahun 2004; Perda Kabupaten Garut No. 8 Tahun 2004;
 - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara penagihan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kabupaten Garut No. 10 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - Diundangkan pada tanggal 17 November 2005.
- Catatan** : -